

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian yang dilakukan secara kualitatif studi kasus deksriptif ini menjelaskan mengenai tahapan yang dilakukan dalam integrasi data pertanahan dan data perpajakan. Proses integrasi data perpajakan dan pertanahan dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu pengumpulan dan persiapan data, pembersihan dan penyelarasan data, integrasi dan klasifikasi data, dan verifikasi lapangan. Proses ini dilakukan secara kolaboratif antara Direktorat Jenderal Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang (DJSPPR), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, dan pihak ketiga. Hasil integrasi menunjukkan bahwa hanya 1.456 bidang tanah yang berhasil diintegrasikan.

Integrasi data perpajakan dan pertanahan masih menghadapi tantangan teknis, regulasi, dan keberlanjutan program. Tantangan ini meliputi verifikasi lapangan yang tetap diperlukan akibat ketidaksesuaian format data antar instansi. Selain itu, belum adanya regulasi yang mengatur standar pertukaran data antar instansi menyebabkan keterbukaan data yang belum optimal. Serta kurangnya informasi mengenai manfaat ekonomi dari integrasi data, sehingga alokasi anggaran untuk

infrastruktur sistem tidak menjadi prioritas, membuat program ini memiliki risiko untuk tidak dilanjutkan.

Hasil analisis spasial terhadap NJOP di enam kelurahan menunjukkan adanya inkonsistensi nilai NJOP, terutama di wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi seperti Jalan KH. R. Abdullah Bin Nuh, Jalan Raya Semplak, Jalan Brigjen Saptadji Hadiprawira, dan Perumahan Taman Yasmin. Berdasarkan perhitungan rata-rata tertimbang, optimalisasi NJOP pada di empat wilayah tersebut dapat menghasilkan peningkatan NJOP sebesar 17%, yang secara langsung berpotensi meningkatkan penerimaan PBB-P2 di enam kelurahan dengan persentase yang sama sebesar 37,2 miliar rupiah.

5.2 Saran

Dari simpulan penelitian tersebut, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

- 1) Kajian mengenai manfaat ekonomi dari integrasi data perlu dilakukan oleh badan pendapatan atau badan keuangan masing-masing daerah agar integrasi data perpajakan dengan data pertanahan melalui sistem *host-to-host* dapat menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran; dan
- 2) Saat ini penelitian hanya mencakup 6 kelurahan di Kecamatan Bogor Barat mengikuti proyek percontohan dari Kementerian ATR/BPN. Harapannya peneliti selanjutnya dapat meneruskan penelitian ini ke wilayah lain sehingga dampak dari integrasi dapat diketahui lebih luas lagi.